

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, pengalaman dan teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia usaha. Untuk dapat melakukan pengambilan keputusan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu informasi akuntansi yang dapat diandalkan sehingga dapat diintegritasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang andal dan relevan.

Saat ini di Indonesia, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengambilan keputusan dalam pemerintah tentunya didasarkan atas informasi-informasi relevan yang diperoleh pemerintah. Begitu pula dengan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah, yang seharusnya didasarkan atas informasi akuntansi atau laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintahan yang bersangkutan.

Suatu keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang baik jika tidak didukung oleh pihak manajemen untuk menghasilkan beberapa rekomendasi keputusan alternatif, yang salah satu diantaranya diambil sebagai keputusan yang terbaik. Maka dari itu dibutuhkan pengalaman dan kemampuan yang cukup dalam

mengambil keputusan terkait suatu kebijakan. Untuk menjamin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bermanfaat, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menentukan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pada proses pengembangan suatu daerah tentu tidak terlepas dari pengambilan kebijakan keuangan yang efektif. Dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah terdiri dari berbagai macam informasi mencakup informasi keuangan, informasi politik, sosial dan informasi lain yang terkait dengan urusan daerah. Kebijakan keuangan disetiap daerah termasuk daerah Kota Tasikmalaya dilakukan berkaitan dengan suatu kegiatan perencanaan dan pengendalian atas keuangan daerah.

Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan diperlukan untuk memberikan atau menyediakan informasi yang relevan bagi entitas. Menurut Marshal B. Romney & Paul John

Steinbert (2017:10) menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti. Pendapat lain dikemukakan oleh John F. Nash dan Martin B. Roberts (2017:18) bahwa :

“Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan sesuatu dasar untuk pengambilan keputusan”.

Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Maka seharusnya informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan terkait perencanaan dan pengendalian keuangan daerah.

Disektor publik, penelitian mengenai penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah lebih banyak berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan pengelolaan dibandingkan untuk pengambilan kebijakan keuangan. Namun, banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan utamanya keputusan yang berhubungan dengan keuangan.

Kota Tasikmalaya sebagai otonom yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Keberadaan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom baru

akan memiliki makna dan mendapatkan pengakuan, apabila pemerintahnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta alat pemotivasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan adalah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua diberlakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuanagan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru pada Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mencegah kebocoran informasi keuangan daerah. Hal ini dipertegas dengan terselenggaranya Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya di Aula Bale Kota pada hari Kamis, 14 Januari 2016. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memberikan pemahaman penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan berbasis akrual. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya menuju sebuah tata kelola keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menandatangani “Fakta Integritas” dukungan penerapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis akrual (Berita Kota Tasikmalaya, 2016).

Pada laporan keuangan tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diterima pada saat Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah antara Kantor wilayah (Kanwil). Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb). Provinsi Jawa Barat dan piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia (RI) kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 dengan capaian

standar tertinggi yang digelar di Gedung Dwi Warna Dirjen. Pembendaharaan Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Barat. Wakil Walikota Drs. H. Muhammad Yusuf mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya didaulat untuk menerima penghargaan Pemerintah Republik Indonesia (RI) tersebut yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid. Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat bahwa hasil capaian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini patut di syukuri karena memiliki makna bahwa :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah di sajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Telah terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang efektif.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuanagn Pemerintah Daerah (LKPD) telah diungkapkan secara memadai.
4. Telah dipenuhinya seluruh ketentuan perundangan yang berlaku (Portal Tasikmalaya, 31 Oktober 2018).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem informasi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan komitmen guna menunjang keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baru.

Fenomena berikutnya berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya salah satunya dana hibah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keganjilan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2017 sebesar Rp.3,2 miliar. Keganjilan tersebut diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) sebesar Rp.108,4 juta, pembayaran Jasa Konsultasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.45,1 juta. Penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban belanja hibahnya Rp.2,29 miliar ditambah penggunaan hibah yang tidak sesuai ketentuan Rp.296,5 miliar, serta kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp.608,3 juta. Meski demikian dalam Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani Wakil Penanggungjawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih menyoroti ketidakpatuhan tersebut atas penerima hibah yang belum mempertanggungjawabkan belanja hibahnya serta kekurangan volume pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Menurut Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan sebanyak 83 penerima hibah dari 575 penerima hibah yang terdiri dari lembaga, badan dan ormas berbadan hukum. Kala itu Pemerinah Kota Tasikmalaya mengucurkan dana hibah sebesar Rp.65,2 miliar, namun sampai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 masih ada Rp.2,29 miliar yang belum dipertanggungjawabkan (Kabar Priangan, 23 September 2018).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bebas dari kesalahan manajerial. Kesalahan dan kelemahan itu bisa bersumber dari software, hardware atau brainware. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi sorotan agar seminimal mungkin kesalahan dapat dieliminir dimasa mendatang.

Dalam penelitian ini penulis merujuk dari hasil penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Sitti Nurnaluri, Ishak Awaluddin, Rio Rizky Ansar (2018) mengkaji mengenai Pengaruh Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Kendari). Hasil penelitian menyatakan bahwa informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan keuangan pada pemerintah kota Kendari.
2. Diana Nova Lintong, David Paul Elia Saerang, Vantje Ilat (2017), mengkaji mengenai Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Irzal Tawaqal, Suparno (2017), mengkaji mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem

pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Banda Aceh.

4. Indana Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza (2017), mengkaji mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
5. Yuliana, Azlim, Nora Rizqi Fitri (2019), mengkaji mengenai Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Karyawan Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pada PT.Tuah Sejati Banda Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi pada PT.Tuah Sejati Banda Aceh.
6. K. Chandra Dewi, Putu Sukma Kurniawan, Nyoman Putra Yasa (2019), mengkaji mengenai Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). hasil penelitian menyatakan bahwa efektifitas sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan transparansi.
7. Risky Ages Purnawati, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Djoko Kristianto (2018), mengkaji mengenai Pengaruh Keahlian Pemakai, Program Pelatihan Dan Pendidikan, Ukuran Organisasi, Dan Formalisasi Pengembangan Sistem

Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT.Kusumahadi Santosa Di Karanganyar). Hasil penelitian menyatakan bahwa keahlian pemakai dan ukuran organisasi berpengaruh positif dan akuntansi PT.Kusumahadi Santosa, sedangkan program pelatihan dan pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi bagian keuangan dan akuntansi PT.Kusumahadi Santosa.

8. Siti Rahmawati Tambe, Herni Sunarya, Akbar Yusuf (2018), mengkaji mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepuasan pengguna informasi akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi dan dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
9. Catur Kristanto, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Djoko Kristianto (2018), mengkaji mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
10. La Soa Nguyen, Manh Dung Tran (2019), mengkaji mengenai Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan Dan Kinerja Keuangan

(Kasus dari Vietnam). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara tingkat pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dan kinerja keuangan.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

N o	Penulis, Tahun, dan Tempat	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Sumber
1	Sitti Nurnaluri, Ishak Awaluddin, Rio Rizky Ansar, (2018). Pengaruh Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Kendari).	Informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan keuangan pada pemerintah kota Kendari.	Variabel penelitian: Informasi Akuntansi (X) dan Pengambilan Kebijakan (Y).	Lokasi penelitian: BPKAD	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume III/1/Februari 2018 ISSN (Online) 2503-1635 ISSN (Print): 2088-4656
2	Diana Nova Lintong, David Paul Elia Saerang, Vantje Ilat, (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu.	Implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kota Kotamobagu.	Variabel penelitian: Sistem Akuntansi (X) Teknik pengumpulan data: Kuesioner.	Variabel penelitian: Pengelolaan Keuangan Daerah (X) Kinerja Pemerintah (Y) Teknik analisis data yang digunakan: Regresi linier berganda.	Jurnal Accountabilty Volume 06, Nomor 01, 2017, halaman 118-127
3	Irzal Tawaqal, Suparno, (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem	Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem	Variabel penelitian: Sistem Informasi Akuntansi	Variabel penelitian: Sistem Pengendalian Intern	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol 2, No 4,

	Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh.	pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.	(X) Teknik pengumpulan data: Kuesioner.	(X) Sumber Daya Manusia (X) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Teknik analisis data: Regresi linier berganda.	2017, halaman 125-135
4	Indana Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza, (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.	Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.	Variabel penelitian: Sistem Informasi Akuntansi (X) Teknik pengumpulan data: Kuesioner. Teknik analisis data: Regresi linier sederhana.	Variabel penelitian: Kualitas Laporan Keuangan (Y) Lokasi penelitian: SKPD	Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol 3, Nomor 2, November 2017
5	Yuliana, Azlim, Nora Rizqi, (2019). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Karyawan Terhadap Sistem Akuntansi Pada PT.Tuah Sejati Banda Aceh.	Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi pada PT.Tuah Sejati Banda Aceh.	Data yang digunakan: Data Primer.	Variabel penelitian: Teknologi Informasi (X ₁) Pengetahuan Karyawan (X ₂) Sistem Informasi Akuntansi (Y)	Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 1 Tahun 2019 e-ISSN 2579-5635 p-ISSN 2460-5891
6	K. Chandra Dewi, Putu Sukma Kurniawan, Nyoman Putra Yasa, (2019). Analisis Efektifitas	Efektifitas sistem informasi akuntansi mampu	Variabel penelitian: Sistem Informasi Akuntansi	Variabel penelitian: Transparansi (Y)	e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha

	Sistem Informasi Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun).	meningkatkan transparansi.	(X)	Lokasi penelitian: Badan Usaha Milik Desa Giri Amertha Desa Tajun.	Jurusan Akuntansi Program S1 Vol : 10 No : 1 tahun 2019
7	Rizky Ages Purnawati, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Djoko Kristianto, (2018). Pengaruh Pemakai, Pelatihan Pendidikan, Organisasi, Formalisasi Pengembangan Terhadap Sistem Akuntansi Pada PT.Kusumahadi Santosa di Karanganyar).	Keahlian pemakai dan ukuran organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi bagian keuangan dan akuntansi PT.Kusumaha di Santosa, sedangkan program pelatihan dan pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi bagian keuangan dan akuntansi PT.Kusumaha di Santosa.	Data yang digunakan: Data Primer. Teknik pengumpulan data: Kuesioner.	Variabel penelitian: Keahlian Pemakai (X ₁) Program Pelatihan dan Pendidikan (X ₂) Ukuran Organisasi (X ₃) Formalisasi Pengembangan Sistem (X ₄) Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Y)	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 Edisi Khusus April 2018 : 244-252
8	Siti Rahmawati Tambe, Herni Sunarya, Akbar Yusuf, (2018). Pengaruh Informasi Terhadap Pajak	Kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi, penggunaan sistem	Variabel penelitian: Sistem Informasi Akuntansi (X)	Variabel penelitian: Pajak (Y) Teknik analisis data:	Jurnal Akuntansi Vol 5, No 2, Mei 2018, halaman 60-78

	Bermotor Di Kantor SAMSAT Dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.	informasi akuntansi dan dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.	Teknik pengumpulan data: Kuesioner.	Regresi linier berganda.	
9	Catur Kristanto, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Djoko Kristianto, (2018). Pengaruh Informasi Pemberian Efektivitas Pengendalian Terhadap Karyawan pada Koperasi Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta).	Pengaruh sistem informasi akuntansi dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.	Variabel penelitian: Sistem Informasi Akuntansi (X ₁) Teknik pengumpulan data: Kuesioner.	Variabel penelitian: Kinerja Karyawan (X ₂) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Y)	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 2 Juni 2018 : 293-304
10	La Soa Nguyen, Manh Dung Tran (2019). Tingkat Pengungkapan Informasi Lingkungan Kinerja Keuangan (Kasus dari Vietnam).	Ada hubungan yang erat antara tingkat pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dan kinerja keuangan.	Variabel penelitian: Informasi Akuntansi (X ₁).	Lokasi Penelitian: Vietnam.	Management Science Letters 9 (2019) 557-570
Inne Purnamasari (2019) : “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dengan variabel-variabel yang digunakan X : Kualitas Informasi Akuntansi, Y : Pengambilan Kebijakan.					

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul : “**Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Daerah** (Sensus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi dan Pengambilan Kebijakan Keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah diidentifikasi diatas yang merupakan dasar penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Kualitas Informasi Akuntansi dan Pengambilan Kebijakan Keuangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian yang disajikan untuk tujuan penyusunan karya tulis ini dapat memberi manfaat :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan terhadap seberapa besar pengaruh informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kota Tasikmalaya.

2. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jln.Letnan Harun No 1, Panglayungan, Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat (46151).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilakukan penulis dimulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019.